

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata saat ini merupakan bisnis unggulan, sebagian orang membutuhkan hiburan untuk memuaskan atau membahagiakan diri (*pleasure*) dan untuk menghabiskan waktu luang (*leisure*). Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Pariwisata yang merupakan suatu industri dalam perkembangannya juga mempengaruhi sektor-sektor industri lain disekitarnya.

Pariwisata sesungguhnya telah dimulai sejak peradaban manusia, yang ditandai oleh adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah atau perjalanan agama lainnya. Bagi Indonesia, jejak pariwisata dapat ditelusuri kembali ke dasawarsa 1910-an, yang ditandai dengan dibentuknya VTV (*Vereeniging Toeristen Verkeer*), sebuah badan pariwisata Belanda, di Batavia. Badan pemerintah ini sekaligus juga bertindak sebagai *tour operator* dan *travel agent*, yang secara gencar mempromosikan Indonesia. Hal ini mendapatkan respon yang sangat baik, dengan meningkatnya minat masyarakat Belanda dan Eropa untuk berkunjung ke Indonesia. Menurut Khodyat (1996), sebagai suatu fenomena yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia maka perkembangan pariwisata *tourist destination* daerah tujuan wisata ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini.

- 1) Daya tarik wisata (*tourist attractions*)
- 2) Kemudahan perjalanan atau aksesibilitas ke daerah tujuan wisata yang bersangkutan, dan
- 3) Sarana dan fasilitas yang diperlukan mengingat kegiatan wisata tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif.

Menurut Sujali (1989) daerah tujuan wisata merupakan salah satu komponen penting sumber daya pariwisata. Faktor geografi merupakan faktor penting untuk pertimbangan pengembangan kepariwisataan. Pendekatan geografi yang mendasarkan pada aspek keruangan mempunyai kaitan yang erat dengan persebaran dari suatu obyek pembahasan. Pengembangan pariwisata yang menggunakan pendekatan keruangan dapat dilihat dari kedudukan obyek wisata terhadap obyek wisata yang lain, hal ini dimaksudkan untuk melihat potensi yang dimiliki obyek wisata dan adanya kemungkinan untuk dikembangkan atau berkembang.

Pengembangan kepariwisataan tidak akan terlepas dari unsur fisik dan non-fisik. Unsur-unsur fisik dan non-fisik tersebut akan menjadi pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan daya dukung obyek dan pertimbangan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata harus didasarkan pada perencanaan, pengembangan, dan arah pengelolaan. Pengembangan pariwisata secara sistematis dan arah pengelolaan itu sendiri sangat membutuhkan perhatian pemerintah, sebagaimana tercermin dalam pembentukan atau pengakuan terhadap Organisasi Pariwisata Nasional. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata, diantaranya merumuskan kebijakan dalam pengembangan pariwisata dan berperan sebagai alat pengawasan kegiatan pariwisata sehingga diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah tujuan wisata.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keindahan alam, flora dan fauna serta beraneka ragam budaya, yang semua dapat memberikan devisa yang cukup besar bagi dunia pariwisata. Secara umum pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan, membuka lapangan usaha baru, membuka lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah, apabila dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Memasuki era globalisasi peranan industri pariwisata harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Sarana dan prasarana dalam suatu objek wisata itu sangat diperlukan

untuk menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang disediakan di suatu objek wisata akan membuat wisatawan nyaman dan betah menikmati objek wisata tersebut. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

Wilayah Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa menjadikan Indonesia memiliki iklim yang memunculkan beraneka ragam flora dan fauna yang mempesona para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Keadaan geografis Indonesia yang berupa hutan hujan tropis, gunung, pantai, dan juga lautan serta keanekaragaman budaya yang merupakan modal dasar yang sangat potensial untuk di jadikan daerah tujuan wisata yang terkenal di dunia. Dilatar belakangi oleh keindahan alam dan keanekaragaman budaya, menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang terkenal akan objek wisata, baik itu objek wisata alam maupun objek wisata budaya. Selain untuk menjaga kelangsungan hidup para pelaku wisata, pendapatan dari objek-objek wisata juga dapat meningkatkan pemasukan bagi pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya. Untuk kelancaran pengembangan pariwisata diperlukan beberapa pendorong yang penting antara lain seperti jalan yang baik, transportasi darat, laut, udara, dan akomodasi sebagai sarana yang tak kalah pentingnya dalam pengembangan pariwisata. Pengelolaan kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan bagaimana wisatawan membelanjakan uang sebanyak- banyaknya selama melakukan wisata. Makin lama wisatawan berada di suatu tempat wisata akan meningkatkan pengeluaran mereka, sehingga akan membangkitkan perusahaan jasa transportasi, hiburan, akomodasi, dan jasa lainnya. Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. Pengembangan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola,

Memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Oleh karena itu pengelolaan dan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-masing daerah. Begitu juga halnya dengan Kabupaten Tangerang yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis yang cukup strategis dengan ibukotanya adalah Tigaraksa. Letak astronomis antara $6^{\circ}00'$ - $6^{\circ}20'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}20'$ - $106^{\circ}43'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,6 km² atau 9,93 % dari seluruh luas wilayah Propinsi Banten dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

(Web Terpadu Pemerintah Kabupaten Tangerang)

Kabupaten Tangerang secara geografis memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun ke Utara. Ketinggian wilayah berkisar antara 0-85 m di atas permukaan laut. Daerah Utara Kabupaten Tangerang merupakan daerah pantai dan sebagian besar daerah urban, daerah timur adalah daerah rural dan pemukiman sedangkan daerah barat merupakan daerah industri dan pengembangan perkotaan.

Kondisi alam di Kabupaten Tangerang yang memiliki topografi relative datar membuat Kabupaten Tangerang tidak banyak memiliki obyek wisata yang alami tidak sepeerti daerah pegunungan yang memiliki topografi relative permukaan tinggi seperti jawa barat di daerah Puncak Bogor, Bandung, dan Garut yang memiliki obyek wisata yang alami, namun saat ini sudah mulai banyaknya sector pariwisata yang ada di Tangerang, Dibawah ini adalah database pariwisata Kabupaten Tangerang tahun 2016 dalam banten dalam angka 2017 yang memberikan informasi tentang

pariwisata-pariwisata yang ada di Kabupaten Tangerang mulai dari pariwisata alami maupun pariwisata buatan, berikut dibawah ini tabel database pariwisata Kabupaten Tangerang tahun 2016.

Tabel 1. Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2016

Uraian	Jumlah
Restaurant / Rumah Makan	132
Situ	8
Kolam Renang	9
Makam Sejarah	43
Usaha Perjalanan Wisata	22
Café	5
Bar, Pub, Karaoke	14
Pusat perbelanjaan	4
Spa, dan salon	14
Bioskop	4
Biliyar	11
Sanggar seni	264
Seni tradisional	8
Seni tradisi	33
Seni modern	72
Total	643

Sumber : Banten dalam angka 2017

Banyaknya pariwisata yang ada di Kabupaten Tangerang menjadi daya Tarik tersendiri yang banyak menarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk dapat berkunjung ke Kabupaten Tangerang diperkuat dengan data wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tangerang.



Sumber: Banten dalam angka 2017

Gambar 1. Persentase Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Tangerang Tahun 2017

Sebagai salah satu daerah yang potensial menjadi daerah tujuan wisata, Tangerang sangat kondusif menjadi daerah pengembangan investasi di bidang pelayanan jasa hotel dan restoran. Tercatat tahun 2016 jumlah wisatawan asing yang berkunjung mencapai 32,72 persen. Jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Tangerang juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, misalnya Hotel Tanjung Kait di Kecamatan Mauk dan Imperial Century Hotel Et Resort di Lippo Karawaci, Atria, IBIS, Fame, Ara di Kelapa Dua dan masih banyak hotel-hotel lainnya. Dengan adanya fasilitas tersebut pariwisata di Tangerang dapat meningkat.

Ada 9 wisata yang terletak di Kabupaten Tangerang yaitu : Pulau Cangkir di Kronjo, Taman wisata Teluk Naga Mas, Wisata World of Wonders Citra Raya di Cikupa, Wisata Taman Buaya Tanjung Pasir, Tanjung Pasir Resort, Pantai Tanjung Pasir, Pantai Tanjung Kait, dan ada obyek wisata baru di Kabupaten Tangerang yang terbentuk dari lahan yang telah lama di tinggal oleh pengusaha tambang pasir. Danau Biru Cisoka terbentuk dari aktivitas manusia, yaitu penambangan pasir dari tahun 2006 sampai 2012. Setelah mencapai kedalaman yang tidak produktif lagi, tempat ini ditinggalkan dan memiliki genangan air. telaga pertama yg kedalamannya 12 Meter,

telaga kedua yang kedalamannya 9 Meter, dan telaga ketiga yang kedalaman nya 19 Meter.

Danau Biru cisoka memiliki akses yang sangat mudah di tempuh mulai dari menggunakan angkutan umum maupun menggunakan kendaraan pribadi, akses jalan sangat mudah dengan konstruksi jalan yang bagus namun hanya bisa dilewati 1 mobil saja. Total luas lahan obyek wisata Danau Biru cisoka ini seluas 5 ha. fasilitas yang ada di Danau Biru cisoka terdapat warung-warung kecil namun karena tidak tertata dengan rapi warung-warung tersebut terlihat kumuh, untuk memanjakan pengunjung agar mendapatkan spot foto yang bagus pengelola menyediakan fasilitas perahu kecil untuk dijadikan tempat berfoto, fasilitas umum seperti toilet, parkir yang kurang memadai padahal lahan untuk membuat area parkir cukup luas dan yang paling penting pembatas area dipinggir Danau Biru yang baru tersedia beberapa bulan lalu. Awalnya wisata Danau Biru cisoka ini dikelola oleh pemilik lahan, namun pada saat obyek wisata Danau Biru viral berteatan dengan pergantian Kepala Desa yang baru, dengan itu Kepala Desa membentuk Organisasi Karang Taruna untuk mengelola objek wisata Danau Biru dan kepala desa mulai memberantas pungli yang sering dilakukan oleh masyarakat dari dua desa untuk pungli tiket masuk dan kepala desa menjadikan satu pintu tiket masuk, karna pengelolaan yang belum cocok menurut kepala desa, akhirnya kepala desa membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada tahun 2018 berharap dapat mengelola obyek wisata Danau Biru ini menjadi lebih baik dan mendapatkan provit yang lumayan untuk desa. Pada awal tahun 2019 setelah ada kunjungan dari dinas pariwisata Provinsi, banyak yang mengusulkan untuk di dirikan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di obyek wisata Danau Biru dan adanya dukungan dari dinas pariwisata Kabupaten Tangerang dengan program membuat POKDARWIS untuk menggali dan mengembangkan obyek wisata yang ada di desa yang memiliki potensi pariwisata dan akhirnya terbentuklah POKDARWIS pada 23 Mei 2019 untuk sepenuhnya mengelola obyek wisata Danau Biru hingga sekarang. Jadi wisata ini hanya menawarkan fasilitas seadanya yang masih sangat minim bagi pengunjung. Namun dengan demikian POKDARWIS tetap

meminta bantuan dari pemerintah untuk membantu mengelola obyek wisata Danau Biru demi memaksimalkan penggunaan dana BUMDES.

Potensi yang ada di Danau Biru cisoka, potensi yang terlihat yaitu potensi sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya, potensi sumber daya manusianya terlihat bagaimana mereka mampu mengelola suatu potensi sumber daya alam yang ada dilingkungannya dengan pengetahuan seadanya yang dimiliki oleh mereka, salah satunya yaitu dengan mengelola suatu wisata alam yang ada di desanya, yaitu wisata Danau Biru cisoka mereka mampu mengelola wisata alam Danau Biru cisoka dengan baik dan dengan terorganisir. Setelah berjalan setahun pengelolaan diambil alih oleh POKDARWIS dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa sampai dengan sekarang. Potensi lainnya yaitu potensi sumber daya alamnya, lahan bekas tambang pasir yang memiliki morfologi yang tidak rata dan memiliki cekungan yang membuat cekungan tersebut diisi oleh air hujan dan membentuk danau, airnya yang biru menurut dinas pariwisata diakibatkan oleh pancaran sinar matahari, pasirnya yang berwarna coklat susu memberikan keindahan dan menjadi daya tarik obyek wisata Danau Biru.

Wisata Danau Biru merupakan wisata yang tergolong murah dengan tiket masuk perkendaraan dengan harga mobil= Rp. 12.000 dan Motor= Rp.7000 dan biaya parkir perkendaraan dengan harga Mobil= Rp. 10.000 dan Motor Rp. 5.000. Untuk mendapatkan foto spot yang bagus pihak pengelola menyediakan rakit yang dihiasi untuk di jadikan foto spot yang menarik dengan di kenakan biaya Rp. 10.000, dan harga tersebut berlaku untuk spot foto lainnya. Jumlah pengunjung menurut POKDARWIS hari regular rata-rata per-hari 10-25 tiket, hari sabtu rata-rata 150 tiket, dan hari minggu rata-rata 200-230 tiket. Saat ini wisata Danau Biru mulai berkembang, kini di Danau Biru terdapat kolam renang, kolam renang ini di sediakan oleh pengelola untuk menambah spot rekreasi untuk keluarga terutama anak-anak, dan pengelola menyediakan saung lesehan untuk mengadakan acara.

Danau Biru walaupun kini sudah mulai berkembang namun masih memiliki banyak kekurangannya mulai dari kurangnya petunjuk pada spot yang berbahaya, masih belum nyamannya fasilitas jalan dari danau 1 ke danau yang lainnya, dan masih kurangnya fasilitas parkir yang masih tidak tertata dengan rapih. Pengelolaan belum maksimal disebabkan oleh pergantian pengelolaan dari pemilik lahan sampai dengan diserahkan kepada POKDARWIS untuk mengelola obyek wisata danu biru. Dengan demikian peneliti telah menemukan masalah dari latar belakang di atas yaitu peneliti ingin mengetahui upaya pengelolaan bekas tambang pasir sebagai obyek wisata di Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah penelitian adalah tidak maksimalnya pengelolaan bekas tambang pasir sebagai obyek wisata di Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten ?

C. Fokus Penelitian

Dari masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti membatasi penelitian ini yaitu: Bagaimana upaya pengelolaan bekas tambang pasir sebagai obyek wisata di Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten ?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengelolaan bekas tambang pasir sebagai obyek wisata di Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Adapun kegunaan penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, pengelola dan masyarakat untuk melakukan upaya pengelolaan pariwisata bekas tambang pasir di Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, serta memperkaya kajian ilmu geografi khususnya di bidang geografi pariwisata.

E. Kajian Pustaka

1. Hakikat Pengelolaan Pariwisata

A. Pengertian pengelolaan pariwisata

Pengelolaan sering disamakan dengan arti manajemen, dimana tujuan dari manajemen dan pengelolaan adalah sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga pengelolaan, dapat diartikan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Pengertian lain dari pengelolaan menurut Harsoyo (1997) yang berasal dari kata “kelola” memiliki arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengelolaan pariwisata haruslah memiliki pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan menurut Dutton dan Hall (1989). Menurut peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata (2011) bahwa pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, pada kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan factor-faktor sosial yang berpengaruh langsung pada keberlanjutannya interaksi antara kelompok masyarakat dan lingkungan fisiknya.

Obyek dan daya Tarik wisata umumnya terdiri dari hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya pengelolaan obyek dan daya Tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapainya sasaran yang diinginkan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomer 67 tahun 1996, pengelolaan dan pengusahaan obyek dan daya Tarik wisata alam meliputi 4 hal yaitu :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.

2. Pengelolaan obyek dan daya Tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada.
3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan obyek dan daya Tarik wisata alam bersangkutan.
4. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya Tarik wisata alam yang bersangkutan.

2. Hakikat Pariwisata

A. Pengertian Pariwisata

Menurut ahli pariwisata yaitu Norval, wisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan Bergeraknya penduduk asing dalam/luar suatu negara/wilayah. Jadi menurut norval wisata adalah sebuah perjalanan dimana setiap individu akan memasuki suatu wilayah bahkan negara dan bukan hanya memasukinya saja melainkan pasti akan menginap atau hanya sekedar tinggal disana untuk berinteraksi dan mengetahui budaya dan kesenian di wilayah/negara yang sedang dia kunjungi.

Menurut definisi yang lebih luas yang dikemukakan oleh Kodhyat (1998) pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Dengan melakukan perjalanan perorangan atau berkelompok kita akan mendapatkan kebahagiaan disaat melihat lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu dalam setiap perjalanan yang dilakukan.

Selanjutnya menurut Musanef (1995) mengartikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi.dengan ini pariwisata menjadi suatu perjalanan yang hanya sementara yang dilakukan dari tempat ketempat yang ingin disinggahi dengan hanya sekedar

untuk menikmati waktu bertamasya dan berekreasi. Menurut undang-undang No.9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari suatu kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya Tarik wisata.

Menurut Hornby dalam buku Kesrul (2003), *Tour is journey in which short stays are made at a number of places, and the traveler finally returns to his or her own place.* Wisata adalah sebuah perjalanan dimana seseorang dalam perjalanannya singgah sementara di beberapa tempat dan akhirnya kembali lagi ke tempat asal, yang merupakan tempat ia memulai perjalanan. Sejauh apapun dia melakukan perjalanan apabila dia kembali lagi pada tempat asalnya atau tempat dimana awal dia memulai perjalanan dan itu lah yang disebut sebagai wisata.

Menurut Hunziker dan Kraft (1942) dalam buku Kesrul (2003) Wisata adalah keseluruhan hubungan dengan gejala-gejala yang timbul dari perjalanan/tinggalnya orang asing, di mana perjalanan tidak bersifat menetap atau dimaksudkan untuk mencari nafkah. Dengan adanya perjalanan yang dilakukan setiap individu akan selalu bertemu atau bersinggungan dengan gejala-gejala yang baru yang mungkin belum pernah ditemukan sebelumnya, dan perjalanannya itu bukan untuk menetap melainkan untuk kembali lagi ke tempat asalnya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka terdapat lima hal penting yang mendasari kegiatan pariwisata :

- 1) Bukan hanya memasukinya saja melainkan pasti akan menginap atau hanya sekedar tinggal disana untuk berinteraksi dan mengetahui budaya dan kesenian di wilayah/negara yang sedang dia kunjungi.
- 2) Dengan melakukan perjalanan perorangan atau berkelompok kita akan mendapatkan kebahagiaan disaat melihat lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu dalam setiap perjalanan yang dilakukan.
- 3) Hanya sekedar untuk menikmati waktu bertamasya dan berekreasi.

- 4) Sejauh apapun dia melakukan perjalanan apabila dia kembali lagi pada tempat asalnya atau tempat dimana awal dia memulai perjalanan dan itu lah yang disebut sebagai wisata.
- 5) Dengan adanya perjalanan yang dilakukan setiap individu akan selalu bertemu atau bersinggungan dengan gejala-gejala yang baru yang mungkin belum pernah ditemukan sebelumnya, dan perjalanannya itu bukan untuk menetap melainkan untuk kembali lagi ke tempat asalnya.

Menurut Yoeti (2008) pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu:

- 1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal;
- 2) Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.
- 3) Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, dimana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan
- 4) Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Dalam pengertian kepariwisataan terdapat empat faktor yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan itu harus dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata semata-mata sebagai pengunjung tempat wisata tersebut.

Dalam pengelolaan pariwisata perlu adanya hasil yang ditunjukkan kepada pengunjung dan perlu adanya strategi pengembangan Pariwisata agar wisata tersebut tetap dikunjungi oleh pengunjung. Menurut Suryono (2004) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk

mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

B. Aspek-Aspek Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata tidak hanya berfokus pada potensi daya tarik wisata saja, namun juga harus memperhatikan aspek 3A (Accessibility, Attraction dan *Amenities*). Hal ini karena aspek 3A tersebut yang menjadi pelengkap keberadaan daya tarik wisata. Adanya daya tarik wisata saja tanpa adanya aksesibilitas, amenitas dan fasilitas pendukung lainnya, menjadikan suatu kawasan atau daerah tidak layak menjadi destinasi pariwisata. Ketersediaan tiga aspek tersebut yang dapat dijadikan patokan untuk mengukur kualitas suatu destinasi pariwisata.

1. Atraksi

Daya tarik atau atraksi wisata menurut Yoeti (1996) adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti:

- a. Alam (Nature), yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dan diusahakan di tempat objek wisata yang dapat dinikmati dan memberikan kepuasan kepada wisatawan. Contohnya, pemandangan alam, pegunungan, flora dan fauna.
- b. Budaya (Culture), yaitu segala sesuatu yang berupa daya tarik yang berasal dari seni dan kreasi manusia. Contohnya, upacara keagamaan, upacara adat dan tarian tradisional.
- c. Buatan Manusia (Man made), yaitu segala sesuatu yang berasal dari karya manusia, dan dapat dijadikan sebagai objek wisata seperti benda-benda sejarah, kebudayaan, religi serta tata cara manusia.

- d. Manusia (Human being), yaitu segala sesuatu dari aktivitas manusia yang khas dan mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Contohnya, Suku Asmat di Irian Jaya dengan cara hidup mereka yang masih primitif dan memiliki keunikan tersendiri.

Pengertian Daya Tarik Wisata menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I, pasal 5, menyebutkan sebagai berikut "daya tarik wisata" adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

2. Aksesibilitas

Menurut Yoeti (1997) bahwa aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai daerah tujuan wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis, serta tersedianya sarana transportasi ke tempat tujuan tersebut. Kondisi transportasi itu seperti jalan, keberadaan moda angkutan, terminal, stasiun pengisian bahan bakar dan lainnya.

Menurut Suwanto (2001) bahwa aksesibilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung kemajuan pariwisata, karena menyangkut pengembangan lintas sektoral. Tanpa dihubungkan dengan jaringan transportasi tidak mungkin sesuatu obyek wisata mendapat kunjungan wisatawan. Obyek wisata merupakan akhir perjalanan wisata dan harus memenuhi syarat aksesibilitas, artinya objek wisata harus mudah dicapai dan dengan sendirinya juga mudah ditemukan.

Soekadijo (2003) juga mengungkapkan persyaratan aksesibilitas terdiri dari akses informasi dimana fasilitas harus mudah ditemukan dan mudah dicapai, harus memiliki akses kondisi jalan yang dapat dilalui dan sampai ke tempat obyek wisata serta harus ada akhir tempat suatu perjalanan.

Akses kondisi jalan menuju obyek wisata, dan jalan akses itu harus berhubungan dengan prasarana umum. Kondisi jalan umum dan jalan akses menentukan aksesibilitas suatu obyek wisata. Aksesibilitas ini merupakan syarat yang sangat penting untuk obyek wisata. Aksesibilitas adalah dapat menentukan kenyamanan atau kemudahan pencapaian lokasi dan hubungannya satu sama lain, mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi. Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

- a. Mudah ditemukan dan dicapai.
- b. Kondisi jalan menuju obyek wisata yang baik.
- c. Memiliki papan petunjuk arah yang jelas.

3. Amenitas atau Fasilitas

Fasilitas dalam lingkup wisata adalah sumber daya buatan manusia yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan wisatawan yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan aktivitas. Fasilitas pariwisata tidak terpisah dengan akomodasi perhotelan karena pariwisata tidak pernah berkembang tanpa penginapan. Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata. Adapun sarana- sarana penting yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata adalah akomodasi hotel, restoran/tempat makan, air bersih, komunikasi, hiburan, dan keamanan (Yoeti, 1997).

C. Aspek pemasaran

Menurut Ahman dan Zulkifli (2019) langkah-langkah pembangunan destinasi pariwisata yang memenuhi persyaratan aksesibilitas, atraksi, dan amenities, dan atraksi yang memadai atau bahkan melebihi harapan. Selanjutnya, perlu diikuti dengan pemasaran dan promosi pariwisata yang

berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek POSE dalam menggunakan media (*Paid media, Own media, Social media, and Endorser*).

Menurut Ahman dan Zulkifli (2019) apabila suatu destinasi wisata sudah maju dan berkembang, maka akan Nampak besarnya peranan manusia dalam meminij atau mengelola destinasi wisata tersebut atau besarnya peranan manusia diwilayah tersebut. Apabila pembangunan di obyek wisata Danau Biru memperhatikan model, strategi, pola-pola strategi pariwisata, maka akan dengan mudah menentukan target dan capaian baik yang berhubungan dengan pergerakan wisatawan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan, maupun target-target lainnya sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat disekitar obyek wisata.



Sumber : Kemenpar RI, 2017.

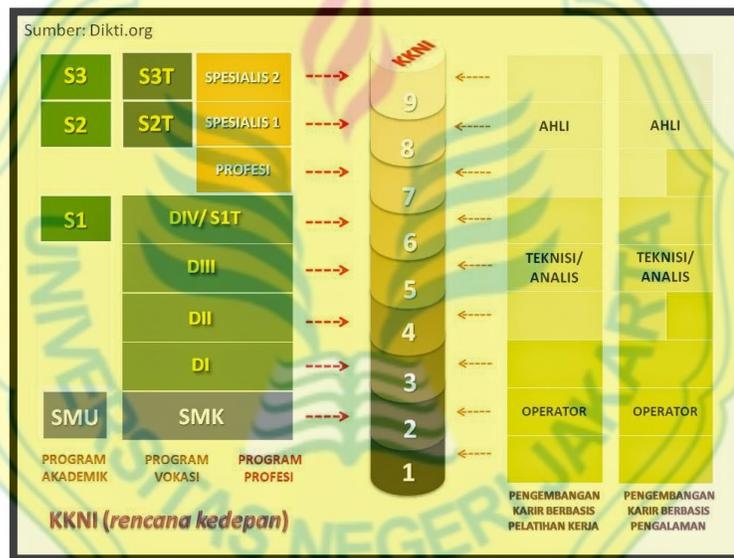
Gambar 2. Pentahelix

Menurut kementerian RI, 2017 dalam buku Ahman dan Zulkifli (2019). ABGCM merupakan kata kunci untuk mencapai kesuksesan adalah kebersmaan dan komitmen antara berbagai unsur dalam pentahelix, yaitu akademisi, bisnis, pemerintah, masyarakat, dan media.

D. Penyiapan SDM

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci dalam berbagai program pembangunan, termasuk bidang pariwisata. Oleh karena itu, berbagai

jenjang pendidikan harus ikut terlibat dalam mempersiapkan SDM pariwisata, baik formal, nonformal, maupun informal. Industri pariwisata membutuhkan tenaga-tenaga yang terdidik dan terlatih pada bidang-bidang yang spesifik dan tersertifikasi minimal berstandar ASEAN sebagaimana kesepakatan sepuluh negara ASEAN tentang MRA-TP (*Mutual recognition arrangement on Tourism Profesional*), yang dirtanda tangani pada tanggal 9 November 2012 di Bangkok, Thailand dan diperbaharui pada tanggal 8 Agustus 2016, dalam acara *internasional conference for MRA-TP* (Kemenpar RI, 2017;81)



Sumber: Kemenpar RI, 2017.

Gambar 3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Menurut Ahman dan Zulkifli (2019) pendidikan formal bidang pariwisata, diharapkan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang atau sub bidang agar dengan mudah diserap oleh industry pariwisata. Di bidang pendidikan nonformal, penyiapan SDM pariwisata dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pelatihan dasar SDM kepariwisataan, pariwisata *goes to campus (to school)*, pembudayaan pariwisata, gerakan sadar wisata, yang

secara selektif dapat mengikuti uji sertifikasi berstandar ASEAN. Sementara itu melalui pendidikan formal, SDM pariwisata melakukan upaya secara mandiri dalam menambah pengetahuan peningkatan pemahaman, serta keterampilan bidang pariwisata melalui proses *learning by doing* masing-masing atau bersama komunitasnya. Dengan kepemilikan sertifikasi kompetensi tersebut membuktikan bahwa para lulusan pendidikan formal bidang kepariwisataan memiliki *skill* yang memadai sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.

E. Daerah Tujuan Wisata

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menjelaskan beberapa pengertian istilah kepariwisataan, antara lain.

1. Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok mengunjungi suatu tempat dan bertujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik suatu tempat wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai layanan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
3. Daerah tujuan wisata dapat disebut juga dengan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Menurut Jackson (dalam I Gde Pitana, 2005: 101) suatu daerah yang berkembang menjadi sebuah destinasi wisata dipengaruhi oleh beberapa hal yang penting, seperti.

1. Menarik untuk klien.
2. Fasilitas-fasilitas dan atraksi.
3. Lokasi geografis.
4. Jalur transportasi.
5. Stabilitas politik.
6. Lingkungan yang sehat.
7. Tidak ada larangan/batasan pemerintah.

Suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Berbagai kebutuhan wisatawan tersebut antara lain, fasilitas transportasi, akomodasi, biro perjalanan, atraksi (kebudayaan, rekreasi, dan hiburan), pelayanan makanan, dan barang-barang cinderamata (Gde Pitana, 2005: 101). Tersedianya berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan akan membuat wisatawan merasa nyaman, sehingga semakin banyak wisatawan yang berkunjung.

Salah satu yang menjadi suatu daya tarik terbesar pada suatu destinasi wisata adalah sebuah atraksi, baik itu berupa pertunjukan kesenian, rekreasi, atau penyajian suatu paket kebudayaan lokal yang khas dan dilestarikan. Atraksi dapat berupa keseluruhan aktifitas keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti belajar tari, bahasa, membuat seperti yang ada di Desa Wisata Krebet, memainkan alat musik tradisional, membajak sawah, menanam padi, melihat kegiatan budaya masyarakat setempat, dan lain-lain (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011: 13).

Atraksi merupakan komponen yang sangat vital, oleh karena itu suatu tempat wisata tersebut harus memiliki keunikan yang bisa menarik wisatawan. Fasilitas-fasilitas pendukungnya juga harus lengkap agar kebutuhan wisatawan terpenuhi, serta keramahan masyarakat tempat wisata juga sangat berperan dalam menarik minat wisatawan. Faktor-faktor tersebut harus dikelola dengan

baik, sehingga menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi wisata dan wisatawan rela melakukan perjalanan ke tempat tersebut.

F. Daya Tarik Wisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daya tarik wisata juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Menurut Suwanto dalam bukunya *Dasar-dasar Pariwisata* (1997:19) mengatakan bahwa objek dan daya tarik wisata dikelompokkan atas :

1. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
2. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada:
3. Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
4. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
5. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka.
6. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
7. Objek wisata alam mempunyai daya tarik karena keindahan alam, pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya.
8. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur

yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

9. Kelayakan Finansial.

G. Prasarana Pariwisata

Menurut Suwantoro (1997: 21) Prasarana wisata adalah sumberdaya alam dan sumberdaya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan.

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata seperti bank, apotik, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat pembelanjaan dan sebagainya.

Dalam pembangunan prasarana pariwisata pemerintah lebih dominan karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilitas manusia antara daerah dan sebagainya yang tentu saja dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja. Yang dimaksud dengan prasarana adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian, dalam hal ini adalah sektor pariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi fungsinya adalah melengkapi sarana kepariwisataan sehingga dapat memberikan pelayanan sebagaimana mestinya.

Prasarana menjadi penting bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu obyek wisata, pengunjung menjadikan prasarana sebagai dasar acuan dari sebuah pariwisata, apabila pembangunan prasarana yang ada di tujuan obyek wisata yang ingin didatangi memiliki pembangunan prasarana yang lengkap, maka prasarana tersebut akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung.

H. Sarana Pariwisata

Tabel 2. Kriteria dan standar minimal sarana prasarana daerah wisata

No.	Kriteria	Standar Minimal
1.	Obyek	Salah satu dari unsur alam, sosial, dan budaya
2.	Akses	Jalan, kemudahan rute, tempat parkir, dan harga parkir yang terjangkau
3.	Akomodasi	Pelayanan penginapan (hotel, wisma, losmen)
4.	Fasilitas	Agen perjalanan, pusat informasi, fasilitas kesehatan, pemadam kebakaran, hydrant, TIC (Tourism Information Center), guiding (pemandu wisata), plang informasi, petugas entry dan exit
5.	Transportasi	Adanya moda transportasi yang nyaman sebagai akses masuk
6.	Catering Service	Pelayanan makanan dan minuman (restoran, kantin, rumah makan)
7.	Aktifitas rekreasi	Aktifitas di lokasi wisata seperti berenang, jalan-jalan, dan lain-lain
8.	Pembelanjaan	Tempat pembelian barang-barang umum
9.	Komunikasi	Adanya TV, sinyal telepon, akses internet, penjual voucher pulsa.
10.	Sistem Perbankan	Adanya bank dan ATM
11.	Kesehatan	Pelayanan kesehatan
12.	Keamanan	Adanya jaminan keamanan
13.	Kebersihan	Adanya tempat sampah dan rambu-rambu peringatan tentang kebersihan
14.	Sarana Ibadah	Fasilitas sarana ibadah
15.	Promosi	

Sumber: Yoeti, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan

wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Tidak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.

Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sarana wisata secara kuantitatif merujuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan.

I. Masyarakat/Lingkungan

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai Objek dan Daya Tarik Wisata akan mengundang kehadiran wisatawan yang berkunjung. Adapun yang ikut berperan dalam pengembangan suatu objek dan daya tarik wisata adalah sebagai berikut menurut Suwanto dalam bukunya *Dasar-dasar Pariwisata* (1997: 23-24) :

1). Masyarakat

Masyarakat di sekitar objek wisata adalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Untuk ini masyarakat di sekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata. Dengan terbinanya

masyarakat yang sadar wisata akan berdampak positif karena mereka akan memperoleh keuntungan dari wisatawan yang membelanjakan uangnya. Para wisatawan akan untung karena mendapat pelayanan yang memadai dan juga mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya.

2). Lingkungan

Di samping masyarakat di sekitar objek wisata, lingkungan sekitar objek wisata pun perlu diperhatikan dengan seksama agar tak rusak dan tercemar. Lalu lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dari fauna dan flora di sekitar objek wisata. Oleh sebab itu perlu ada upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu objek wisata.

3). Budaya

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu objek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu lingkungan budaya ini kelestariannya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung. Masyarakat yang memahami, menghayati dan mengamalkan Sapta Pesona Wisata di daerah tujuan wisata menjadi harapan semua pihak untuk mendorong pengembangan pariwisata yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

J. Peran Pemerintah dalam pariwisata

Menurut I Nengah. 2006 bahwa ada 3 peran pemerintah dalam pariwisata yaitu :

- a. Perencanaan Pariwisata, Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan

dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu:

- (1) Perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata,
- (2) Perencanaan penggunaan lahan,
- (3) Perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain,
- (4) Perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan
- (5) Perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan.

b. Pembangunan Pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.

c. Kebijakan Pariwisata merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah disepakati antar berbagai pihak yang bermitra. Dan kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra ini.

Secara umum dalam kebijakan kemitraan dibidang pariwisata telah dirumuskan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Perpres No 7 tahun 2005), maupun pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 dan 2007 (Lihat Perpres No 39 tahun 2005 dan Perpres No 19 tahun 2006). Namun demikian, kebijakan ini belum dirumuskan secara lebih operasional mencakup batasan ruang lingkup kemitraan yang dapat dilakukan pemerintah, mekanisme dan kedudukan masing-masing aktor yang terlibat, serta pedoman implementasinya. Pengembangan potensi pariwisata pemerintah daerah dapat mengembangkan sebuah kerjasama atau bermitra dengan pihak lain, (swasta) dengan didasarkan sebuah pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Ke sinergian dan saling menguntungkan adalah harapan yang akan dicapai dengan mewujudkan sebuah kerjasama yang mutualisme.

Kebijakan yang dibuat pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; flora dan fauna yang langka, air, tanah dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu,

penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.

3. Hakikat Tambang Pasir

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomer 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan pasir termasuk salah satu jenis pertambangan mineral. Pertambangan pasir merupakan pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air tanah.

a. Dampak negatif tambang pasir

Berdasarkan Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Serta pasca tambang, kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan dan penjualan tidaklah menimbulkan gangguan keseimbangan lingkungan hidup yang berarti untuk dipersoalkan. Penambangan, pengolahan dan pemurnian dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan lingkungan hidup yang cukup besar, apabila tidak dilakukan pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya. Kegiatan penambangan dapat menyebabkan berubahnya morfologi permukaan tanah, punahnya vegetasi di sekitar tambang, dan permukaan tanah menjadi cekungan seperti danau buatan.

b. Dampak positif Tambang Pasir

Walaupun tambang pasir memiliki banyak dampak negatif, namun disisi lain tambang pasir memiliki dampak positifnya dimana dampak positifnya yaitu adanya lapangan pekerjaan yang memberikan pekerjaan untuk masyarakat setempat untuk memenuhi kehidupan keluarganya selain itu adanya tambang pasir dapat memenuhi kebutuhan papan atau dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang sampai saat ini masih gencar dilakukan di Indonesia, dan dampak positif lainnya dari adanya

tambang pasir, galian pasir yang sudah tidak di tambang lagi dapat menjadi suatu daerah yang khas, seperti halnya Danau Biru cisoka dan tebing koja yang dimana bekas galian pasir dijadikan sebuah obyek wisata yang dapat menghasilkan rupiah untuk menjadi mata pencaharian warga setempat pasca berakhirnya tambang pasir.

F. Penelitian Relevan

Pertama jurnal dari Mahara Sintong (2011), Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Dengan judul Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang untuk Tempat Rekreasi dengan Reklamasi di Sungai Bingai Kecamatan Binjai Selatan Kodya Binjai, dengan menggunakan metode penelitian Survey dan Pengamatan langsung, dan Studi Pustaka. Hasilnya Kedalaman muka air tanah terdiri dari 0-3 meter dari permukaan tanah, fluktuasi atau perbedaan ketinggian dari air muka tanah pada saat musim kemarau dan penghujan sebesar 0,5 meter sampai dengan 2,0 meter. Setelah kegiatan reklamasi diperlukan revegetasi tergantung kepada kesiapan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta pemantauan tanaman. Dengan mereklamasi lahan bekas tambang makadaya dukung tanah akan meningkat dan tercapainya tata guna lahan yang optimal.

Kedua jurnal dari Linda Purba Ningrum (2015), Ardy Maulidy Navastara Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Dengan judul Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Tanah Urug di Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, dan hasilnya Untuk memperkuat jenis pemilihan pemanfaatan lahan, pemanfaatan lahan yang terpilih dibandingkan dengan kondisi lahan yang sesungguhnya dan juga dengan standar pada Permen PU No.41/PRT/M/2007, tentang pedoman kriteria teknis kawasan Budi Daya. Dari keempat jenis pemanfaatan lahan, hasil perbandingan menunjukkan jenis pemanfaatan yang memiliki kecenderungan besar dapat dimanfaatkan pada lokasi studi lahan bekas tambang tanah urug di kecamatan Ngoro, Mojokerto adalah wisata dengan jenis wisata buatan (*outdoor*)

Ketiga Skripsi dari Ogi Wara Pradana (2011) dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. yang berjudul upaya pemanfaatan lahan bekas galian tambang timah di Kuto Panji, Belinyu Provinsi Bangka Belitung. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif agar dapat mengarahkan pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dampak yang di timbulkan pasca tambang menyisakan lubang tambang, air asam tambang, tailing, berkurangnya ekosistem hutan, upaya yang dilakukan pasca penambangan timah yaitu dengan reklamasi, pengolahan kualitas air, dan pengolahan limbah, upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat setempat dengan melakukan percontohan biogas, pemanfaatan kolong untuk ternak itik peking, dan sumber rekreasi baru.

Keempat Skripsi dari Trianingsih Widiati yang berjudul Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan sampai dengan saat ini masih belum memiliki program pengembangan pariwisata yang rinci. Pada dasarnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan pemasaran dan promosi terhadap obyek wisata, akan tetapi, belum ada regulasi obyek wisata sehingga obyek wisata belum bisa memanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Bulungan.

Kelima, Skripsi dari Wardana yang berjudul Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan hasil dari penelitian ini yaitu Untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang ada pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat saat ini sedang mengupayakan beberapa langkah strategis pengembangan pariwisata, ini tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat. Adapun beberapa program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata diantaranya, melalui publikasi media, pameran dan melakukan event-event seperti Festival Teluk Stabas.

Keenam, Jurnal Daud Jordan Adha, Agustina Nurul Hidayati dan Widyanto Hari Subagyo W. yang berjudul Arahan Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Pasir Di Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan Hasil dari penelitian ini adalah alternative pemanfaatan lahan sebagai pemandian alam dikarenakan pemanfaatan lahan yang paling optimal dan potensial untuk diimplementasikan pada lokasi penelitian, guna mendapatkan peningkatan nilai lahan tertinggi dan terbaik.

Tabel 3. Penelitian Relevan

No	Nama	Judul Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mahara Sintong	Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang untuk Tempat Rekreasi dengan Reklamasi di Sungai Bingai Kecamatan Binjai Selatan Kodya Binjai	Survey dan Pengamatan langsung, dan Studi Pustaka	Hasilnya Kedalaman muka air tanah terdiri dari 0-3 meter dari permukaan tanah, fluktuasi atau perbedaan ketinggian dari air muka tanah pada saat musim kemarau dan penghujan sebesar 0,5 meter sampai dengan 2,0 meter. Setelah kegiatan reklamasi diperlukan revegetasi tergantung kepada kesiapan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta pemantauan tanaman. Dengan mereklamasi lahan bekas tambang makadaya dukung

				tanah akan meningkat dan tercapainya tata guna lahan yang optimal.
2.	Linda Purba Ningrum, dan Ardy Maulidy Navastara	Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Tanah Urug di Kecamatan Ngoro, Mojokerto	Deskriptif Kualitatif	<p>Untuk memperkuat jenis pemilihan pemanfaatan lahan, pemanfaatan lahan yang terpilih dibandingkan dengan kondisi lahan yang sesungguhnya dan juga dengan standar pada Permen PU No.41/PRT/M/2007, tentang pedoman kriteria teknis kawasan Budi Daya. Dari keempat jenis pemanfaatan lahan, hasil perbandingan menunjukkan jenis pemanfaatan yang memiliki kecenderungan besar dapat dimanfaatkan pada lokasi studi lahan bekas tambang tanah urug di kecamatan Ngoro, Mojokerto adalah wisata dengan jenis wisata buatan (<i>outdoor</i>)</p>
3.	Ogi Wara	upaya	Deskriptif	bahwa dampak yang di

Pradana	pemanfaatan lahan bekas galian tambang timah di Kuto Panji, Belinyu Provinsi Bangka Belitung	timbulkan pasca tambang menyisakan lubang tambang, air asam tambang, tailing, berkurangnya ekosistem hutan, upaya yang dilakukan pasca penambangan timah yaitu dengan reklamasi, pengolahan kualitas air, dan pengolahan limbah, upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat setempat dengan melakukan percontohan biogas, pemanfaatan kolong untuk ternak itik peking, dan sumber rekreasi baru.	
4.	Trianingsih Widiati Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan sampai dengan saat ini masih belum memiliki program pengembangan pariwisata yang rinci. Pada dasarnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan pemasaran dan promosi terhadap obyek wisata, akan

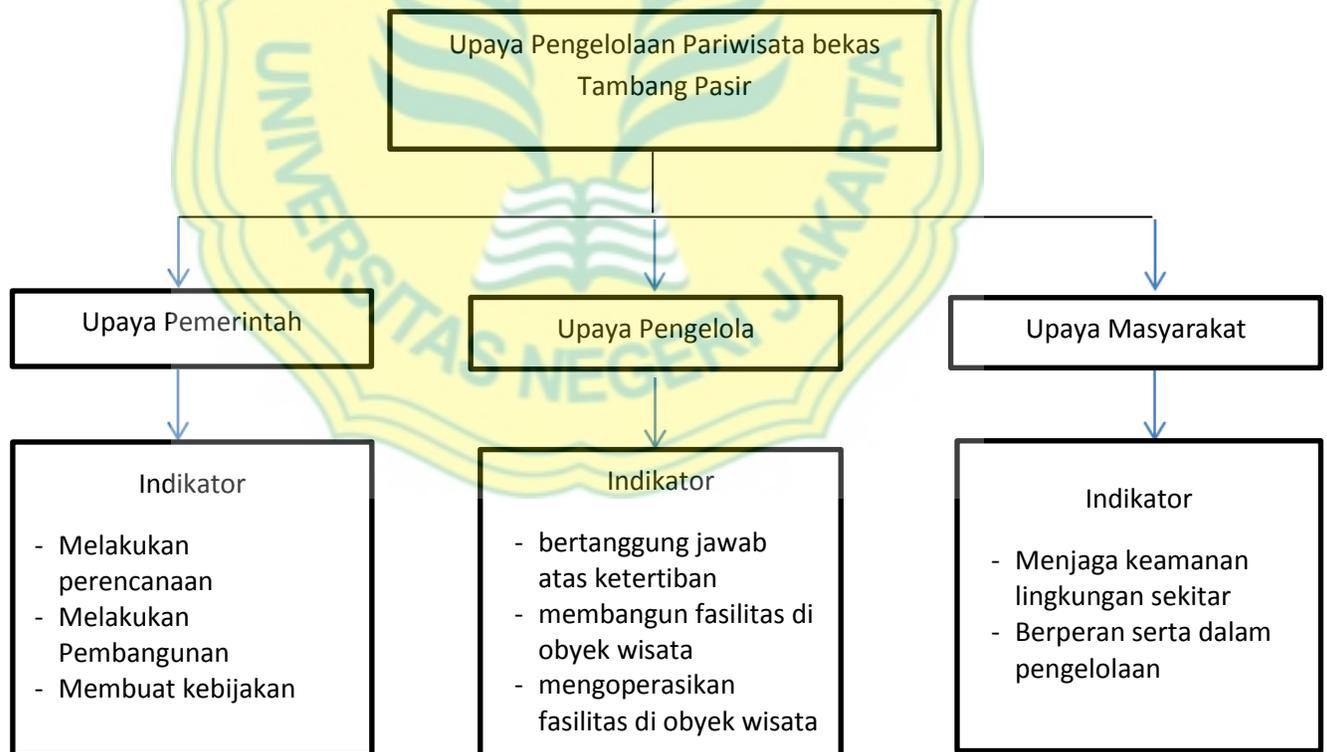
				tetapi, belum ada regulasi obyek wisata sehingga obyek wisata belum bisa memanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Bulungan.
5.	Wardana	Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan sampai dengan saat ini masih belum memiliki program pengembangan pariwisata yang rinci. Pada dasarnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan pemasaran dan promosi terhadap obyek wisata, akan tetapi, belum ada regulasi obyek wisata sehingga obyek wisata belum bisa memanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Bulungan.
6.	Daud Jordan Adha, Agustina Nurul	Arahan Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Pasir di Desa Besuk Kec.	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah alternative pemanfaatan lahan sebagai pemandian alam dikarenakan pemanfaatan

Hidayati, Tempeh,
dan Kabupaten
Widyanto Lumajang
Hari
Subagyo
W

lahan yang paling optimal
dan potensial untuk
diimplementasikan pada
lokasi penelitian, guna
mendapatkan peningkatan
nilai lahan tertinggi dan
terbaik.

Sumber: Jurnal Geografi vol,3 No 2 tahun (2011), Jurnal Teknik ITS vol. 4 No. 1 (2015), Skripsi Ogi Wara Pradana (2011), Skripsi Trianingsih Widiati (2016), dan Skripsi Wardana (2017), Jurnal Daud Jordan Adha.

G. Kerangka Berpikir



Gambar 4. Kerangka Berfikir

Seiring dengan berjalannya waktu, sektor pariwisata menjelma menjadi sektor yang paling diminati dan memiliki potensi baik untuk dikembangkan. Hal ini tentunya berhubungan dengan kehidupan manusia yang juga membutuhkan liburan dan *refreshing*. Oleh karena itu, Pariwisata tumbuh dan berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu. Keingintahuan manusia akan segala sesuatu dan rasa penasaran untuk dapat menikmati tempat-tempat baru juga merupakan pemicu perkembangan pariwisata. Baik situasi ataupun pariwisata yang terjadi dalam segala aspek kehidupan di daerah lain menjadi daya Tarik tersendiri dalam pengembangan pariwisata.

Pada dasarnya, pemerintah dan masyarakat merupakan dua pihak yang berpengaruh dalam pembangunan obyek wisata. Peningkatan terhadap permintaan obyek wisata juga di pengaruhi oleh pengelolaan obyek wisata yang baik. Wisatawan tentunya akan tertarik untuk berkunjung. Dalam hal ini Dinas Pariwisata berperan dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tangerang. Potensi wisata tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengunjung dan menjadikan obyek wisata yang terus diminati oleh wisatawan agar dapat meningkatkan kemandirian daerah. Pengembangan terhadap obyek wisata di Kabupaten Tangerang ini dapat dilaksanakan dengan pengelolaan yang baik. Focus penelitian ini akan diuraikan dalam alur alur pikir di atas.